

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH

Aduwina Pakeh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
aduwina@utu.ac.id

Abstract

One of the aspects that central among the implementation of regional autonomy are related to segregation and amalgamation areas that aims to strengthen the relationship between government of regions and people in order growth democratic life. The practice of good governance the government the regions is an effort to strengthen democracy. It means, good governance good from the perspective of the community meaningful receive public services local governments quality .One segregation of the region is segregation of aceh barat into three areas , namely Simeulue, Nagan Raya and Aceh Jaya in 2002. At the time conflict aceh stirs that it demands the community not covered by local government services closest to the distric was segregated .In addition happened euphoria the act of regional autonomy. This study aims to analyze perceptions of Simeulue, Nagan Raya and Aceh Jaya to regional government performance in providing basic service after segregation of areas and whether there are differences between third the government the area. Survey used technique the random samples of 150 derived from three the district segregation.Of respondents about 150 terambil 58 respondents (38.7 %) of the Nagan Raya, 42 respondents (28.0 %) of the Seumeulu and about 50 respondents (33.3 %) of the Aceh Jaya.Using analysis of variance (ANOVA) show services are equal treatment, there is no difference perception excessive rata-rata worth 2.1.This means public perceptions in local government services in those areas part aceh barat biasa-biasa course

Keywords: *Regional Autonomy, Segregation of the Region, Public Services, the Public Perception*

1. PENDAHULUAN

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan mejadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan. Aceh Barat secara sah berstatus sebagai kabupaten melalui Undang-Undang ini.

Pada Tahun 1996, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet dan Jaya dengan ibukota Meulaboh dan Kabupaten Adminstratif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga, Arongan Lambalek, Bubon, Pantee Ceureumen, Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

Ketika otonomi daerah dicanangkan lewat UU No 4 Tahun 2002, bumi Teuku Umar yang luasnya 10.097.04 Km² atau 1.010.466 Ha ini pun dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2016, isu pemekaran kabupaten Aceh Barat kembali mencuat hangat, iaitu rencana pemekaran ibu kota kabupaten Aceh Barat iaitu Meulaboh sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Meulaboh. Wacana itu sudah masuk ke tahap penggodokan di kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

Pemerintahan yang demokratis perlu menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang diberikan dan menilai kinerjanya dengan baik (Northover 2005; Schneider and Teske 1992). Tingkat penerimaan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh terhadap apakah pimpinan daerah dapat dipercayai untuk mengelola pemerintahan. Oleh karena itu menurut Yaghi (2008), tingkat penerimaan masyarakat adalah penting bagi upaya mempertahankan kinerja yang baik dan upaya memperbaiki kinerja yang buruk; dan inilah makna tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian penilaian kepuasan pelayanan publik dan good governance terhadap Pemerintah Daerah, menurut Yaghi (2008) lebih penting dibandingkan penilaian terhadap sistem pemerintah yang lebih tinggi. Hal disebabkan empat hal yaitu (1) kedekatan tempat tinggal warga dengan pelayanan publik pemerintah daerah, (2) hubungan emosional warga terhadap pegawai dan pimpinan pemerintah daerah, (3) akses warga terhadap pelayanan publik dan (4) terdapat warga yang berperan ganda sebagai warga sekaligus pegawai pemerintah daerah.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai bagian administrasi pemerintah yang dijalankan secara demokrasi (Hatisman and Cousinea 2001; Imhanlahimi 2006; UN 2007). Definisi mencakup bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan adalah bagian dari tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, menurut Yaghi (2008), good governance atau tata kelola pemerintah yang baik berkaitan dengan keputusan harian sebagai bagian pelaksanaan keputusan yang menghasilkan pelayanan publik yang dapat dievaluasi oleh yang lain. Untuk itu, praktek good governance harus memberikan kepuasan terhadap delapan criteria yang dikenal dengan (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3)

daya tanggap, (4) partisipasi, (5) taat terhadap aturan, (6) efektifitas dan efisiensi, (7) persamaan hak dan kewajiban dan (8) membangun konsensus antar pihak.

Good governance bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menyediakan tingkat *acceptable* Pelayanan publik kepada masyarakat untuk mempertahankan integritas pemerintahan yang demokratis. Untuk menguji apakah warga yang tinggal di wilayah yang berbeda dapat mempersepsikan good governance dengan kebiasaan atau tata cara yang sama atau apakah pemerintah lokal mempraktekkan *good governance* secara berbeda, maka penelitian ini untuk menguji penilaian masyarakat Simeulue, Nagan, dan Aceh Jaya terhadap kinerja pemerintah daerah setempat.

Penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman teori dan praktek terhadap ide good governance di masing-masing daerah pemekaran. Asumsinya adalah bahwa semua Pemerintah Daerah diharapkan menyediakan pelayanan publik dan menjalankan pemerintahan dan dengan cara itu dapat memuaskan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan besarnya adalah jika menggunakan kriteria yang sama untuk menilai pelaksanaan pemerintah dalam good governance, akankah masyarakat Simeulue, Nagan Raya dan Aceh Jaya menilai pemerintah daerah sama atau berbeda?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan survey sebagai teknik pengambilan sampel secara acak terhadap 150 yang berasal dari tiga wilayah kabupaten pemekaran yaitu Simeulue, Nagan Raya dan Aceh Jaya. Dari 150 responden terambil sebanyak 58 responden (38.7%) dari area Nagan Raya, 42 responden (28.0%) dari area Seumeulu dan sebanyak 50 responden (33.3%) dari area Aceh Jaya. Analisis statistik yang digunakan adalah Analysis of Variance (ANOVA) satu jalur. Analisis ini digunakan untuk menguji tingkat perbedaan pemahaman (in means) between responses pada sampel warga dari ketiga wilayah (untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis). Survey menggunakan kuesioner terstruktur pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala likert dengan pilihan (1) Buruk, (2) Ragu-Ragu, (3) Tidak ada pendapat, (4) Biasa-Biasa saja dan (5) Baik. Kuesioner terdiri dari tiga kategori pertanyaan evaluasi yaitu (1) penilaian kepuasan warga terhadap pelayanan publik oleh Pemda secara umum, (2) penilaian kepuasan warga terhadap 15 atribut pelayanan publik Pemda dan (3) penilaian kepuasan warga terhadap 11 kriteria good governance yang dilakukan oleh Pemda.

3. PEMBAHASAN

Sebagian besar masyarakat di setiap daerah (Nagan Raya, Seumeulu dan Aceh Jaya) menilai tata kelola pemerintah dan pelayanan publik sebagian besar biasa-biasa saja (56,7%). Penilaian baik (26%) di seluruh daerah berturut-turut diperlihatkan pada atribut pelayanan publik (1) pengurusan KTP, KK dan Akte Lahir, (2) Penerapan Syariat Islam dan (3) Kesehatan. Selain itu, terdapat beberapa variabel good governance yang harus diperbaiki yaitu (1) Kesiapsiagaan/Kecepatan. Pelayanan Pemda dalam menangani Keluhan Masyarakat, (2) Masalah Transparansi Pengelolaan Anggaran dan (3) Realisasi Visi dan Misi atau Janji Pimpinan Daerah saat Kampanye. Pilkada. Hal itu dianggap sebagian besar masyarakat di tiga daerah masih lemah dan perlu diperbaiki. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 1.

Variabel	Buruk	Ragu-ragu	Tidak ada pendapat	Biasa-biasa saja	Baik	Rata-rata
Kepuasan keseluruhan	12.0%	3.3%	2.0%	56.7%	26.0%	3.81
Pengurusan KK,KTP dan Akte Lahir	6.7%	1.3%	0.7%	40.0%	51.3%	4.28

Kesehatan	10.7%	7.3%	2.0%	44.7%	35.3%	3.87
Pendidikan	7.3%	10.7%	13.3%	34.7%	34.0%	3.77
Penanggulangan Sampah	33.3%	8.7%	7.3%	39.3%	11.3%	2.87
Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan, Parit, Got) Perkotaan	31.3%	8.7%	8.7%	32.7%	18.7%	2.99
Penanggulangan Bencana Alam	15.3%	20.7%	11.3%	32.0%	20.7%	3.22
Pelayanan Pemerintah terhadap Korban Konflik	16.0%	12.0%	11.3%	48.0%	12.7%	3.29
Kondisi Pembangunan Infrastruktur (Jalan dan Jembatan)	22.7%	8.7%	5.3%	43.3%	20.0%	3.29
Kondisi Pembangunan Sarana Irigasi Pertanian	20.0%	13.3%	10.7%	32.7%	23.3%	3.26
Penerapan dan Penegakan Syariat Islam	12.7%	10.0%	4.7%	52.0%	20.7%	3.58
Perencanaan Pembangunan Partisipatif di setiap level (Gampong, Kecamatan dan kabupaten)	8.7%	16.0%	12.7%	40.0%	22.7%	3.52
Peran Pemerintah dalam	19.3%	15.3%	11.3%	32.7%	21.3%	3.21
Melindungi Hutan						
Pelayanan PLN terhadap pelanggan	15.3%	8.0%	8.7%	38.7%	29.3%	3.59
Pelayanan PDAM terhadap pelanggan	26.0%	7.3%	16.7%	34.7%	15.3%	3.06
Peran Pemerintah dalam menanggulangi korban KDRT	19.3%	16.0%	20.0%	32.0%	12.7%	3.03
Pemerintah merespons atau peka terhadap keluhan masyarakat	22.0%	12.7%	10.0%	38.7%	16.7%	3.15
Pemerintah menginformasikan dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat	17.3%	10.0%	9.3%	48.7%	14.7%	3.33
Pemerintah bersikap adil dan merata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	27.3%	16.7%	5.3%	38.7%	12.0%	2.91

Pemerintah bertindak cepat dalam menindak lanjuti keluhan masyarakat	21.3%	24.7%	8.7%	36.7%	8.7%	2.87
Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dalam membahas isu-isu kebijakan	25.3%	20.0%	15.3%	28.7%	10.7%	2.79
Pemerintah bersikap transparansi/terbuka dalam pengelolaan anggaran	42.0%	12.0%	10.0%	28.7%	7.3%	2.47
Pemerintah mengalokasi anggaran daerah secara proporsional (antara belanja pegawai	19.3%	18.0%	22.7%	30.7%	9.3%	2.93
Pemerintah membuka akses kepada masyarakat terhadap pelayanan publik	8.0%	13.3%	18.0%	39.3%	21.3%	3.53
Pandangan sekilas terhadap Pemerintah Daerah	22.7%	10.7%	6.7%	42.0%	18.0%	3.22
Realisasi visi dan misi pimpinan daerah (terkait janji pada masa kampanye)	36.7%	11.3%	14.0%	28.0%	10.0%	2.63
Keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan publik pada setiap level	22.7%	14.7%	10.7%	35.3%	16.7%	3.09

Tabel 1. : Tabel Statistik Deskriptif Penelitian

Tingkat Penilaian Secara Umum

Secara umum, Hasil Anova menunjukkan hasil yang hampir signifikan pada $\alpha = 0.05$, tetapi jika dinaikan sedikit dengan α sebesar 0.052, maka sudah dapat dipastikan hasil Anova signifikan. Ini menunjukkan bahwa minimal ada satu pasangan area tentang tingkat kepuasan warga pada kinerja pemerintahan secara umum berbeda, terlihat pada tabel (2) hasil Anova.

ANOVA

Kepuasan keseluruhan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8.685	2	4.342	3.038	.051
Within Groups	210.088	147	1.429		
Total	218.773	149			

Tabel 2. : Tabel ANOVA terhadap penilaian pelayanan publik secara umum

Hasil uji beda nyata berdasarkan tabel 3. menunjukkan tingkat kepuasan warga pada kinerja pemerintahan secara umum di Nagan Raya dan Aceh Jaya berbeda nyata, sedangkan pasangan lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (Nagan Raya vs Seumeulu, Seumeulu vs Aceh Jaya), dengan Aceh Jaya yang mempunyai grad rata-rata tingkat

kepuasan paling tinggi dan Nagan Raya mempunyai grad rata-rata tingkat kepuasan paling rendah (lihat pada tabel 4.)

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: Kepuasan keseluruhan						
LSD						
	Mean Difference (I-J)				95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Nagan Raya	Seumeulu	-.41133	.24222	.092	-.8900	.0673
Aceh Jaya		-.54276*	.23070	.020	-.9987	-.0868
Seumeulu	Nagan	.41133	.24222	.092	-.0673	.8900
Raya		-.13143	.25022	.600	-.6259	.3631
Aceh Jaya	Nagan	.54276*	.23070	.020	.0868	.9987
Raya		.13143	.25022	.600	-.3631	.6259

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Tabel 3. : Tabel hasil uji beda nyata terhadap penilaian pelayanan publik secara umum

	area		
	Nagan	Seumeulu	Aceh Jaya
	Raya		
	Mean	Mean	Mean
Kepuasan keseluruhan	3.52	3.93	4.06

Tabel 4. : Tabel rata-rata kepuasan terhadap penilaian pelayanan publik secara umum

Tingkat Penilaian Atribut Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil uji Anova pada Tabel 5. menunjukkan tingkat penghantaran pelayanan publik di setiap wilayah tidak berbeda nyata atau sama di bawah tingkat signifikansi > 0.05. Hal ini diperkuat dengan hasil rata-rata pada Tabel 6. bahwa nilai rata-rata hampir sama di setiap wilayah.

ANNOVA

tingkat penghantaran pelayanan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.609	2	.805	1.530	.220
Within Groups	77.286	147	.526		
Total	78.896	149			

Tabel 5. : Tabel ANOVA terhadap penilaian pelayanan publik

	area		
	Nagan Raya	Seumeulu	Aceh Jaya
	Mean	Mean	Mean
tingkat penghantaran pelayanan	3.37	3.54	3.28

Tabel 6. : Tabel rata-rata kepuasan terhadap penilaian pelayanan publik

Tingkat Penilaian *Good Governance*

Berdasarkan hasil uji Anova pada Tabel 7. menunjukkan tingkat penghantaran pelayanan publik di setiap wilayah tidak berbeda nyata atau sama di bawah tingkat signifikansi > 0.05. Hal ini diperkuat dengan hasil rata-rata pada Tabel 8. bahwa nilai rata-rata hampir sama di setiap wilayah

ANOVA

kinerja administrasi pemerintahan local

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.539	2	.770	1.203	.303
Within Groups	94.082	147	.640		
Total	95.621	149			

Tabel 7. : Tabel ANOVA terhadap penilaian good governance

	area		
	Nagan Raya	Seumeulu	Aceh Jaya
	Mean	Mean	Mean
kinerja administrasi pemerintahan local	2.93	2.91	3.14

Tabel 8. : Tabel rata-rata kepuasan terhadap penilaian good governance

Tingkat Penilaian Masing-Masing Atribut Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil uji Anova menunjukkan terdapat tiga atribut pelayanan publik yaitu (1) Penanggulangan Sampah, (2) Kebersihan Jalan dan Sanitasi Perkotaan (selokan, parit dan got), dan (3) Pelayanan PDAM terhadap pelanggan yang berbeda nyata. Hal ini diperlihatkan oleh Tabel 9.

ANOVA		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penanggulangan sampah	Between Groups	36.60	2	18.297	8.944	0.000
	Within Groups	300.74	147	2.046		
	Total	337.33	149			
Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan, Parit, Got)	Between Groups	15.86	2	7.929	3.367	0.037
	Within Groups	346.12	147	2.355		

Perkotaan	Total	361.97	149			
Pelayanan PDAM terhadap pelanggan	Between Groups	23.30	2	11.65	5.964	0.003
	Within Groups	287.16	147	1.953		
	Total	310.46	149			

Tabel 9. : Tabel ANOVA terhadap penilaian tiga atribut pelayanan publik

Selanjutnya tingkat kepuasan masyarakat tentang masalah penanggulangan sampah menunjukkan perbedaan antar wilayah diantaranya adalah Nagan Raya dengan Seumeulu, Seumeulu dan Aceh Jaya. Selain itu tingkat kepuasan terhadap kebersihan jalan dan sanitasi perkotaan, Seumeulu dan Aceh Jaya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pelayanan PDAM terhadap pelanggan dapat dirasakan berbeda tingkat kepuasannya yaitu di Nagan Raya dan Seumeulu, Aceh Jaya dan Seumeulu. Hal ini diperlihatkan oleh Tabel 10.

Dependent Variable	(I) area	(J) area	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
Penanggulangan sampah	Nagan Raya	Seumeulu	-0.970	0.290	0.0010
		Aceh Jaya	0.232	0.276	0.4012
	Seumeulu	Nagan Raya	0.970	0.290	0.0010
		Aceh Jaya	1.203	0.299	0.0001
	Aceh Jaya	Nagan Raya	-0.232	0.276	0.4012
		Seumeulu	-1.203	0.299	0.0001
Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan, Parit, Got) Perkotaan	Nagan Raya	Seumeulu	-0.487	0.311	0.1195
		Aceh Jaya	0.346	0.296	0.2452
	Seumeulu	Nagan Raya	0.487	0.311	0.1195
		Aceh Jaya	0.832	0.321	0.0105
	Aceh Jaya	Nagan Raya	-0.346	0.296	0.2452
		Seumeulu	-0.832	0.321	0.0105
Pelayanan PDAM terhadap pelanggan	Nagan Raya	Seumeulu	-0.846	0.283	0.0033
		Aceh Jaya	0.065	0.270	0.8104
	Seumeulu	Nagan Raya	0.846	0.283	0.0033
		Aceh Jaya	0.910	0.293	0.0022
	Aceh Jaya	Nagan Raya	-0.065	0.270	0.8104
		Seumeulu	-0.910	0.293	0.0022

Tabel 10. : Tabel perbedaan tingkat kepuasan antar daerah pada tiga atribut pelayanan publik

Tingkat kepuasan terhadap ketiga atribut yaitu Masalah Penanggulangan Sampah, Kebersihan Jalan dan Sanitasi dan Pelayanan PDAM terhadap Pelanggan menunjukkan ketiga atribut unggul di daerah Seumeulu dan paling rendah di Aceh Jaya, dan hal ini menunjukkan adanya tingkat perbedaan antar daerah (Tabel 11).

	area		
	Nagan	Seumeulu	Aceh Jaya
	Mean	Mean	Mean
Penanggulangan sampah	2.67	3.64	2.44
Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan, Parit, Got) Perkotaan	2.97	3.45	2.62
Pelayanan PDAM terhadap pelanggan	2.84	3.69	2.78

Tabel 11. : Tabel keunggulan tingkat kepuasan pada tiga atribut pelayanan public

Berdasarkan nilai skor rata-rata dengan menggunakan rentang kriteria diketahui bahwa atribut (1) Penanggulanagn Sampah, (2) Kebersihan Jalan dan Sanitasi Perkotaan dan (3) Pelayanan PDAM terhadap pelanggan di Nagan Raya dan Aceh Jaya dinilai biasa saja sedangkan di Seumeulu sudah cukup baik. Hal diperlihatkan oleh Tabel 12.

Peubah	Nagan Raya		Seumeulu		Aceh Jaya	
	Rata- rata	Kesimpulan	Rata-rata	Kesimpulan	Rata-rata	Kesimpulan
Penanggulangan sampah	2.67	Biasa saja	3.64	Cukup puas	2.44	Biasa saja
Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan, Parit, Got) Perkotaan	2.97	Biasa saja	3.45	Cukup puas	2.62	Biasa saja
Pelayanan PDAM terhadap pelanggan	2.84	Biasa saja	3.69	Cukup puas	2.78	Biasa saja

Tabel 12. : Tabel nilai skor penilaian tiga atribut pelayanan publik berdasarkan rentang kriteria

Hubungan Daerah Dengan Penilaian Secara Umum, Penilaian Atribut Pelayanan Publik Dan Penilaian *Good Governance*. Pengolahan data crosstab menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara daerah dengan tingkat penilaian secara umum. Hal ini dapat dilihat pada Tabel. 13.

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.087	8	.010
Likelihood Ratio	a	8	.011
Linear-by-Linear Association	19.842	1	.019
N of Valid Cases	5.512		

a. cells (40.0%) have expected count less than The minimum expected count is .84.

Tabel 13. : Tabel crosstab hubungan antara daerah dengan tingkat penilaian secara umum

SIMPULAN

Tingkat kepuasan warga pada kinerja pemerintahan secara umum pada ketiga wilayah tidak sama atau berbeda nyata. Wilayah yang berbeda yaitu Nagan Raya dan Aceh Jaya. Sedangkan Kepuasan warga terhadap atribut pelayanan publik dan praktek good governance di ketiga wilayah sama atau tidak berbeda nyata.

Dilihat dari masing-masing atribut pelayanan public, terdapat tiga atribut yang berbeda signifikan di setiap wilayah dengan tingkat kepuasan di Aceh Jaya paling rendah Ketiga atribut tersebut adalah (1) Penanggulangan Sampah, (2) Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan, Parit dan Got) Perkotaan dan Pelayanan PDAM terhadap Pelanggan. Secara umum hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan untuk semua Pemerintah Daerah berkaitan dengan praktek good governance adalah (1) masalah keluhan masyarakat yang seharusnya cepat ditanggapi, (2) transparansi pengelolaan anggaran dan (3) realisasi janji pemimpin. Pembangunan yang melibatkan partisipatif masyarakat rata-rata setiap daerah belum mengarah menunjukkan kinerja yang baik.

REFERENSI

- Anonym. 2007. *Aceh Barat dalam Angka*. Biro Pusat Statistik Aceh Barat. Meulaboh.
- Hartono, Yudi. 2005. *Sejarah Pemekaran Aceh Barat*. Makalah pada Seminar Analisis Sosial di Aceh. Jogjakarta.
- Northover, Patricia. 2005. 'Small States and "Good Governance" for Sustainable "Development": Introduction', *Social and Economic Studies*, 54 (4): 2-13.
- Schneider, Mark and Paul Teske. 1992. 'Toward a Theory of the Political Entrepreneur: Evidence from Local Government', *American Political Science Review*.
- Yaghi, Abdulfattah. 2008. "Good Governance Practices by Local Administration in Jordan and USA". *International Journal of Rural Management*, 4 (1&2): 47-65.
- Hatisman, John and Kan Cousinea. 2001. 'Municipal Customers Satisfaction Study'. Association of Municipal Managers, Clerks And Treasures of Ontario, 1-2.
- Imhanlahimi, Joseph E. 2006. 'Public Administration in India: 21st Century Challenges for Good Governance', *Social and Economic Studies*, 55 (3): 212-17.
- UN Economic and Social Council. 2002. *Enhancing the Capacity of Public Administration to Implement the United Nations Millennium Declaration*. New York City, Committee of Experts on Public Administration, First session. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN003535.pdf> (Akses pada 2 November 2015).